



KLIPING MEDIA MASSA TAHUN 2019
BPK PERWAKILAN PROVINSI BANTEN RI

1.	RADAR BANTEN	(4)	SATELIT NEWS
2.	BANTEN POS		
3.	KABAR BANTEN		

JANUARI	MEI	20 SEPTEMBER	2019
FEBRUARI	JUNI	OKTOBER	
MARET	JULI	NOVEMBER	
APRIL	AGUSTUS	DESEMBER	

Galian C Dianggap Meresahkan



TOLAK GALIAN C: Sejumlah warga Kecamatan Bojonegara dan Pulo Ampel, keluhkan keberadaan galian C di daerahnya, yang dianggap mengganggu aktivitas warga. Mereka menggelar Konferensi Pers, terkait hal itu, Kamis (19/9).

Warga Bojonegara dan Pulo Ampel Berharap Solusi

SERANG, SN—Sejumlah masyarakat Kecamatan Bojonegara dan Pulo Ampel, meminta Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah untuk mengatasi persoalan galian C yang ada di wilayahnya. Hal itu dikarenakan, dampak dari galian tersebut mengakibatkan kerusakan lingkungan. Seorang warga, Furkon mengatakan, melihat kondisi saat ini di Kecamatan Bojonegara dan Pulo

Ampel, sangat jauh dari kata layak. Banyak masyarakat yang terserang penyakit, serta rumah penduduk sudah dipenuhi oleh debu dari aktifitas galian. Oleh karena itu tambahnya, melihat kondisi tersebut pihaknya berharap dapat bertemu dengan Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah, dan meminta untuk membantu mengatasi persoalan tersebut. "Ada beberapa poin yang ingin kita sampaikan disaat bertemu dengan ibu Bupati. Pertama, pemerintah harus bisa mengkaji antara perusahaan yang legal ataupun ilegal, kalau ada perusahaan yang ilegal kami minta

untuk menutup perusahaan tersebut," kata Furkon, Kamis (19/9). Ketua Karang Taruna Kecamatan Bojonegara, Misnan mengatakan, kerusakan lingkungan yang terjadi di Kecamatan Bojonegara dan Pulo Ampel sudah lama terjadi, diantaranya banyaknya perusahaan yang membuang limbah ke laut. Selama ini-pun ujarnya, masyarakat sudah berulang kali melakukan aksi protes. Namun lagi - lagi, aksi tersebut tidak membuahkan hasil. "Dari pergerakan kedua, ketiga dan sampai sekarang ini sepakat gerakan-

BACA HAL 15

Pemerintah Diminta Turun Tangan

■ GALIAN C ...

Sambungan dari hal 9

nya adalah cinta lingkungan. Kami di lapangan sering sekali frontal masalah lingkungan, sempat saya terjadi penahanan sementara di Polsek gara - gara menangani masalah lingkungan. Jadi, pas saya tanya kepada dinas

nggak ada izinnya. Tapi pas di bawah, ada izinnya," tuturnya.

Disinggung mengenai izin pertambangan merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Banten, ia menegaskan bahwa pihaknya sudah paham terkait hal tersebut. Tetapi, dirinya meminta Pemkab Serang juga bertanggung jawab untuk mem-

fasilitasi masyarakat bertemu dengan Gubernur Banten.

"Kalau berharap ada rekomendasi dari Ibu Bupati untuk ketemu dengan Gubernur, saya berharap seperti itu. Artinya kami punya daerah, dan daerah nanti memfasilitasi kami ke Provinsi," pungkasnya. (sidik/mardiana)